
**PENGELOLAAN PROGRAM RASKIN TERHADAP PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA AEK PAMIENKE,
KECAMATAN AEK NATAS, KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA**

Yarniwati Sarumaha¹ Hisar Siregar² Nalom Siagian³

¹Aparatur Sipil Negara Kabupaten Nias Selatan

²Dosen Fakultas Hukum UHN

³Dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UHN³

nalom.siagian@uhn.ac.id

ABSTRAK : Penelitian ini mengkaji mengenai implementasi pengelolaan program RASKIN terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Aek Pamiyenke, Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Adapun yang menjadi titik fokusnya adalah mengenai pengelolaan RASKIN. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif karena metode ini dianggap sangat relevan dengan materi tersebut serta dapat digunakan untuk menguji krisis suatu teori serta memaknai fenomena. Adapun yang menjadi informan utama adalah Kepala Desa Aek Pamiyenke dan informan tambahan yaitu Masyarakat Desa Aek Pamiyenke.

Penelitian ini berangkat dari masalah penelitian, yakni bagaimanakah pengelolaan program RASKIN di Desa Aek Pamiyenke dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan program raskin tersebut di Desa Aek Pamiyenke. Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui kinerja pegawai dalam mengimplementasi pengelolaan program RASKIN dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program raskin di Desa Aek Pamiyenke Kecamatan Aek

Proses program RASKIN masih belum berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan masyarakat desa Aek Pamiyenke. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa tanggapan masyarakat mengenai RASKIN yang mengatakan bahwa masih ada nya kualitas beras yang tidak bagus. Untuk kedepannya masih lebih diperlukan sosialisasi implementasi program RASKIN tersebut dan perlu ditingkatkan kebijakan pemerintah dalam memberi bantuan kepada masyarakat desa Aek Pamiyenke.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Program RASKIN, Pelayanan public

ABSTRACT : This study examines the implementation of RASKIN program management towards improving people's welfare in Aek Pamiyenke Village, Aek Natas Sub-district, Labuhan Batu Utara Regency. The focus point is on RASKIN management. This research uses descriptive qualitative method because this method is considered highly relevant to the material and can be used to test the crisis of a theory and interpret the phenomenon. The main informants were the Head of Aek Pamiyenke Village and the additional informant, Aek Pamiyenke Village Community.

This research departs from the research problem, that is how the management of RASKIN program in Aek Pamienke Village and the factors that influence the management of raskin program in Aek Pamienke Village. With the purpose of research to determine the performance of employees in implementing RASKIN program management and to determine the factors that affect the implementation of Raskin program in Aek Pamienke Village Aek Sub

The process of RASKIN program is still not running smoothly as expected by Aek Pamienke villagers. This can be seen from some community responses about RASKIN saying that there is still the quality of rice that is not good. For the future, it is still necessary to socialize the implementation of the RASKIN program and it is necessary to improve the government's policy in providing assistance to the people of Aek Pamienke village.

Key Word: Policy Implementation, RASKIN Program, Public service

PENDAHULUAN

Penelitian ini mengangkat tema mengenai Implementasi Pengelolaan RASKIN Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Aek Pamienke. Berbagai macam program dilakukan dalam upaya pengentasan kemiskinan, baik yang berupa material maupun non material. Salah satu program bantuan yang di canangkan pemerintah yang masih berjalan hingga saat ini adalah beras miskin (Raskin).

Mengingat tingginya angka jumlah penduduk miskin dan diperparah oleh sulitnya penduduk miskin akan akses terhadap pangan karena rendahnya daya beli sebagai akibat krisis. Tingginya harga BBM yang naik berimplikasi pada harga bahan pokok yang melonjak tinggi terutama beras, dengan demikian daya beli masyarakat miskin rendah karena mengingat harga yang tidak terjangkau. Program ini dibentuk agar keluarga miskin mempunyai akses yang baik terhadap pangan dalam hal harga dan kesediaan. Beras miskin (Raskin) diberikan dengan harga yang sangat murah kepada masyarakat miskin, sehingga dapat mmengurangi beban kebutuhan penerima Beras Miskin (Raskin), dengan jumlah yang sudah ditentukan dan diberikan diberikan satu kali per bulan.

Program beras untuk keluarga miskin atau disebut Program Raskin merupakan salah satu program pemerintah pusat dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan. Sasarannya adalah berkurangnya beban pengeluaran rumah tangga sasaran (RTS) dalam memenuhi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi. Raskin merupakan subsidi pangan pokok dalam bentuk beras yang diperuntukkan bagi keluarga miskin sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan pada keluarga miskin. Beras merupakan makanan pokok sebagian besar penduduk Indonesia.

Berdasarkan kondisi ini, suatu masyarakat disebut miskin apabila memiliki pendapatan jauh lebih rendah dari rata-rata pendapatan sehingga tidak banyak memiliki kesempatan untuk mensejahterakan dirinya (**Suryawati, 2004**). Program semacam ini sebenarnya sudah ada sejak krisis pangan di Indonesia pada tahun 1998 yang dinamakan dengan Operasi Pasar Khusus (OPK).

Namun, baru pada tahun 2002 program OPK ini diubah namanya menjadi program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) dan pada tahun 2008 menjadi beras bersubsidi untuk masyarakat berpendapatan rendah (Raskin).

Raskin merupakan salah satu dari berbagai program-program pro rakyat yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan. Raskin adalah salah satu bentuk upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang menjadi cita-cita Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu melindungi segenap tanah air dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Undang-Undang Desa yang baru saja disahkan oleh DPR pada 18 Desember 2013 yang lalu digadang-gadang akan menjadi jalan keluar berbagai permasalahan, terutama masalah kemiskinan di Indonesia. UU Desa ini nantinya akan mengatur pendapatan Desa untuk pembangunan, yang nilai rata-ratanya mencapai Rp 1,4 milyar per tahun.

Pada Maret 2016, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 28,01 juta orang (10,86 persen), berkurang sebesar 0,50 juta orang dibandingkan dengan kondisi September 2015 yang sebesar 28,51 juta orang (11,13 persen). Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2015 sebesar 8,22 persen, turun menjadi 7,79 persen pada Maret 2016. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan naik dari 14,09 persen pada September 2015 menjadi 14,11 persen pada Maret 2016. Selama periode September 2015–Maret 2016, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun sebanyak 0,28 juta orang (dari 10,62 juta orang pada September 2015 menjadi 10,34 juta orang pada Maret 2016), sementara di daerah perdesaan turun sebanyak 0,22 juta orang (dari 17,89 juta orang pada September 2015 menjadi 17,67 juta orang pada Maret 2016).

Tidak seluruh masyarakat Indonesia yang berhak atas RASKIN, hanya mereka yang tergolong miskin dan rawan pangan di daerah tertentu mendapat hak untuk menerima RASKIN. Untuk memilih kelompok yaitu sesuai kriteria yang ditetapkan data keluarga miskin dan rawan pangan dikumpulkan dari berbagai sumber seperti Kelurahan, LSM, dan sebagainya. Data tersebut dibawa ke musyawarah desa untuk diteliti kebenarannya dan dikoreksi, apabila ada data yang rangkap atau yang tidak sesuai, kemudian musyawarah Desa memilih dan menetapkan keluarga yang termasuk paling miskin dan rawan pangan sesuai jumlah plafon yang disediakan. Kebijakan pendistribusian Raskin secara bagi rata di Desa Aek Pamienke tersebut nampaknya telah berjalan bertahun-tahun. Hal ini terjadi dimungkinkan adanya kecemburuan sosial oleh warga yang tidak menerima Raskin dan menuntut kepala desa untuk membagi beras Raskin secara merata.

Program Raskin bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran RTS melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras. Tujuan dari penelitian ini adalah supaya pemerintah lebih memperhatikan masyarakat yang kurang mampu,

yang berhak mendapatkan RASKIN. Karena dilihat dari hasil persentase diatas, total populasi kemiskinan sangat lebih besar. Kemiskinan pada umumnya didefinisikan dari segi ekonomi, khususnya pendapatan dalam bentuk uang ditambah dengan keuntungan-keuntungan non-material yang diterima oleh seseorang. Namun demikian, secara luas kemiskinan juga kerap didefinisikan sebagai kondisi yang ditandai oleh serba kekurangan : kekurangan pendidikan, keadaan kesehatan yang buruk, dan kekurangan transportasi yang dibutuhkan oleh masyarakat (**SMERU dalam Suharto *et.al.*, 2004**).

Kemiskinan merupakan situasi serba kekurangan yang terjadi bukan dikehendaki oleh si miskin. Penduduk pada umumnya ditandai oleh rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan, dan gizi serta kesejahteraannya sehingga menunjukkan lingkaran ketidakberdayaan. Kemiskinan disebabkan oleh terbatasnya sumber daya manusia yang dimiliki dan dimanfaatkan terutama dari tingkat pendidikan formal maupun nonformal dan membawa konsekuensi terhadap pendidikan informal yang rendah (**Supriatna, 2000:196**).

Selain pendidikan, pengangguran dan kesehatan, masalah kemiskinan merupakan masalah utama yang harus diatasi bersama pada tahun 2015 oleh Pemkab dan seluruh stakeholder atau pelaku pembangunan di Kabupaten Labuhan Batu Utara. Proses penyaluran yang kurang efektif menyebabkan program ini menuai permasalahan di dalam masyarakat. Berangkat dari berbagai permasalahan tersebut, penulis menganggap perlu adanya evaluasi serta kajian yang membahas tentang proses penyaluran program bantuan Beras Miskin (Raskin) yang di canangkan oleh Pemerintah

LANDASAN TEORI

Dalam setiap penelitian harus mempunyai kejelasan titik tolak yang menjadi landasan berpikir bagi proses penelitian dalam menyoroti berbagai permasalahan yang diteliti. Teori adalah seperangkat konstruk (konsep), definisi, proposisi dan berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis, melalui spesifikasi hubungan antar variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena.

Pertama-tama, saya akan membahas bagaimana memilih dan menulis suatu topik yang menjadi titik fokus penelitian. Dalam hal ini, penting juga dipertimbangkan apakah topik tersebut hanya sekedar menambah pengetahuan yang sudah ada, atau sekedar menduplikasikan penelitian-penelitian sebelumnya, atau justru berusaha menyuarkan kembali hak-hak kelompok atau individu yang terpinggirkan, atau membantu keadilan sosial, atau justru berusaha mengtransformasi gagasan-gagasan para peneliti sebelumnya.

Berdasarkan rumusan diatas maka dalam bagian ini penulis akan mengemukakan teori, pendapat, gagasan yang akan menjadi titik tolak landasan berpikir dalam penelitian ini.

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik (Budi Winarno, 2014 : 146). Berbagai tujuan dari kebijakan tentu tidak akan tercapai dengan sendirinya tanpa kebijakan tersebut

diimplementasikan. Definisi implementasi itu sendiri mengalami perubahan seiring dengan perkembangan studi implementasi itu sendiri. Pressman dan Wildavsky sebagai pelopor studi implementasi memberikan definisi sesuai dengan dekadanya. Pemahaman mereka banyak terpengaruh oleh paradigma dikhotomi politik-administrasi.

Dari berbagai kata kunci yang mulai digunakan untuk mendefinisikan implementasi tersebut, Van Meter dan Horn mendefinisikan implementasi secara spesifik, yaitu : “ *Policy implementation encompasses those actions by public or private individuals (or group) that are directed at the achievement of subjectives set forth in prior policy decisions*”. Demikian juga diungkapkan Kiviniemi bahwa : “*Public policy implementation is usually a complex process. It often takes years, and it involves several different groups of actors at different groups actors its different stages. The real situation of implementations structures varies dynamically, with changing group of implementors, opponents, and outsiders, and these groups cross the institutional boundaries of public agencies and of the public and private spheres* (Budi Winarno, 2014 : 63).

Implementasi pada intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to delivery policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan. Tujuan kebijakan diharapkan akan muncul manakala *policy output* dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok sasaran sehingga dalam jangka panjang hasil kebijakan akan mampu diwujudkan (Budi Winarno, 2014 : 21). Tahapan implementasi sebagai proses untuk mewujudkan tujuan kebijakan sering disebut sebagai tahap yang penting (*critical stage*). Disebut penting karena tahapan ini merupakan “jembatan” antara dunia konsep dan dunia realita. Dunia konsep yang dimaksudkan di sini tercermin dalam kondisi ideal, sesuatu yang dicita-citakan untuk diwujudkan sebagaimana terformulasikan dalam dokumen kebijakan. Sementara dunia nyata adalah realitas dimana masyarakat sebagai kelompok sasaran kebijakan sedang bergelut dengan berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan politik (Budi Winarno, 2014 : 65). Kegagalan ataupun keberhasilan implementasi suatu kebijakan dalam mewujudkan tujuan kebijakan yang telah digariskan, dalam literatur studi implementasi kemudian dikonseptualisasikan sebagai kinerja implementasi. Kinerja implementasi inilah yang kemudian menjadi salah satu fokus perhatian yang penting dalam studi implementasi. Kinerja implementasi suatu kebijakan paling tidak dipengaruhi oleh empat faktor fundamental, yaitu: (i) kebijakan itu sendiri yang berkaitan dengan kualitas dan tipologi kebijakan yang diimplementasikan; (ii) kapasitas organisasi yang diberikan mandat untuk mengimplementasikan kebijakan; (iii) kualitas SDM aparatur yang bertugas mengimplementasikan kebijakan; dan (iv) kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik dimana kebijakan tersebut diimplementasikan. Untuk dapat menentukan tinggi-rendahnya kinerja implementasi suatu kebijakan maka penilaian terhadap kinerja (*performance measurement*) merupakan sesuatu yang penting.

Kemiskinan

Definisi tentang kemiskinan sangat beragam, mulai dari sekedar ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan memperbaiki keadaan, kurangnya kesempatan berusaha, hingga pengertian yang lebih luas yang memasukkan aspek sosial dan moral. Dalam arti sempit, kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Dalam arti luas, kemiskinan merupakan suatu fenomena *multiface* atau multidimensional. Kemiskinan juga berarti kekurangan kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat yang layak (Ali Khomsan. 2015 : 1)

Kesejahteraan Sosial

Fungsi-fungsi kesejahteraan sosial bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi tekanan-tekanan yang diakibatkan terjadinya perubahan-perubahan sosio-ekonomi, menghindarkan terjadinya konsekuensi-konsekuensi sosial yang negatif akibat pembangunan serta menciptakan kondisi-kondisi yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian memegang peranan penting dalam sebuah penelitian. Hal ini karena semua kegiatan yang dilaksanakan dalam penelitian sangat tergantung dengan metode yang digunakan. Sesuai dengan pendapat Creswell penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan (Jhon W Creswell, 2014 : 5). Oleh karena itu metode yang akan digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif diartikan sebagai pendekatan yang menghasilkan data, tulisan dan tingkah laku yang dapat diamati. Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan atau melukiskan apa yang sedang diteliti dan berusaha memberikan gambaran yang jelas dan mendalam tentang apa yang sedang diteliti yang menjadi pokok permasalahan. dilaksanakan di desa Aek Pamienke Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhan Batu Utara. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada pertimbangan peneliti dalam menyesuaikan konteks penelitian yaitu mengenai Implementasi kebijakan alokasi dana desa dalam pembangunan desa.

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan "*social situation*" atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat (place), pelaku (actors), aktivitas (activity) yang berinteraksi secara sinergis. (Sugyono, 2010 : 14). Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari.

Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian terdapat berbagai tehnik sampling yang digunakan *Snowball sampling* adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar (Sugyono, 2010 : 85). Pengambilan

sampel dengan teknik non-probabilistik mengacu pada contoh *Snowball Sampling*. *Snowball Sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan mengajukan pertanyaan kepada subkelompok untuk mengidentifikasi orang lain yang mungkin bisa kita teliti pula.

Pengumpulan data meliputi usaha membatasi penelitian, pengumpulan informasi melalui observasi dan wawancara, baik yang terstruktur maupun tidak, dokumentasi, materi-materi visual, serta usaha merancang protokol untuk merekam atau mencatat informasi. Prosedur-prosedur pengumpulan data dalam penelitian kualitatif melibatkan empat jenis strategi (Jhon W.Cresweel, 2010 : 266).. Analisis Data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus-menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis, dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian Analisis data melibatkan pengumpulan data yang terbuka, yang didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan umum, dan analisis informasi dari para partisipan. Analisis bukti (data) terdiri atas pengujian, pengkategorian, pentabulasian, ataupun pengombinasian kembali bukti-bukti untuk menunjukkan proposisi awal suatu penelitian.

Distribusi penduduk Desa Aek Pamienke berdasarkan agama dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

Tabel 1.

Distribusi penduduk Desa Berdasarkan agama di Desa Aek Pamienke

No	Nama Dusun	Kristen Protestan	Katolik	Islam
1.	Dusun I	143	-	503
2.	Dusun II	167	-	567
3.	Dusun III	154	-	509
4.	Dusun IV	145	-	539
5.	Dusun V	69	25	541
6.	Dusun VI	143	79	567
7.	Dusun VII	134	56	538
8.	Dusun VIII	125	-	465
9.	Dusun IX	146	20	564
Jumlah		1,226	180	4793

Desa Aek Pamienke didominasi penduduk yang beragama Kristen Protestan sebanyak 1,226 jiwa. Penduduk yang beragama Kristen Katolik sebanyak 180 jiwa dan penduduk yang beragama islam sebanyak 4,793 jiwa, sedangkan Hindu dan Budha tidak ditemukan di Desa Aek Pamienke atau tidak terdata.

Distribusi penduduk Desa Aek Pamienke berdasarkan jenis pekerjaan, dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

Tabel 2.
Distribusi penduduk Desa Aek Pamienke berdasarkan pekerjaan

Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
Petani	107	108
Buruh tani	1079	800
Pedagang	106	267
TNI/POLRI	50	30
PNS	32	45
Pensiunan PNS/TNI/POLRI	-	-
Jumlah	1,374	1,250

Angka di atas tentunya tidak sesuai dengan jumlah di Desa Aek Pamienke karena masih banyak penduduk yang masih menjalani pendidikan tingkat atas dan juga tingkat bawah yang masih belum layak dikategorikan sebagai tenaga kerja maupun tenaga ahli. Dari data di atas jelaslah bahwa di Desa Aek Pamienke banyak yang bekerja sebagai petani/buruh tani karena lokasi daerah ini strategis untuk lokasi pertanian bagi kemajuan penduduk setempat.

Kinerja Implementasi Program RASKIN

Seperti penjelasan Bab I, penelitian ini di lakukan untuk mengetahui bagaimana kinerja implementasi UU No. 1 Tahun 2016, tentang pedoman umum subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah mengenai penelitian Program RASKIN yaitu di Desa Aek Pamienke Kecamatan Aek Natas. Penelitian ini mencoba menjawab pertanyaan mengenai bagaimana kinerja implementasi Program RASKIN di Desa Aek Pamienke Kecamatan Aek Natas dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi hambatan atau penyebab dari Program RASKIN tersebut.

Kebijakan publik merupakan dasar untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku, kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan. Kebijakan dibuat untuk mengatasi persoalan atau permasalahan yang dihadapi publik sekaligus mewujudkan suatu kondisi yang diinginkan demi kepentingan masyarakat. Pada akhirnya, kebijakan publik akan berujung pada tindakan pemerintah yang didukung oleh dua hal, yaitu: sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah dan nilai-nilai yang ingin dicapai.

Implementasi kebijakan merupakan proses pelaksanaan kebijakan setelah kebijakan ditetapkan/ditetujui oleh pembuat kebijakan dan dilaksanakan oleh lembaga-lembaga pelaksana, baik individu atau pejabat ataupun kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam isi kebijakan itu. Tujuan kebijakan (Program RASKIN) tersebut tentu tidak akan tercapai dengan sendirinya tanpa kebijakan tersebut

diimplementasikan. Oleh sebab itu, tahapan implementasi sebagai proses untuk mewujudkan tujuan kebijakan sering disebut sebagai tahap yang penting. Disebut penting karena tahapan ini merupakan “jembatan” antara dunia konsep dengan dunia nyata. Dunia konsep yang dimaksud di sini tercermin dalam kondisi ideal, sesuatu yang dicita-citakan untuk diwujudkan sebagaimana terformulasikan dalam dokumen kebijakan. Sementara dunia nyata adalah realitas dimana masyarakat sebagai kelompok sasaran kebijakan sedang bergelut dengan berbagai persoalan baik sosial, ekonomi dan politik.

Kegagalan ataupun keberhasilan implementasi suatu kebijakan dalam mewujudkan tujuan kebijakan yang telah digariskan, dalam literatur studi implementasi kemudian dikonseptualisasikan sebagai kinerja implementasi. Kinerja implementasi inilah yang kemudian menjadi salah satu fokus perhatian yang penting dalam studi implementasi. Sebagai fokus kajian, kinerja implementasi menjadi bagian yang paling penting dalam studi implementasi. Subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah adalah hak masyarakat yang berpendapatan rendah yang diberikan dan ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka membantu mencukupi sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.

Peningkatan Pengelolaan RASKIN terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Aek Pamienke

Dapat di ketahui bahwa implementasi kebijakan program beras untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) khususnya di Desa Aek Pamienke berhasil di implementasikan. Pada kenyataan diatas telah membuktikan bahwa implementasi kebijakan RASKIN berjalan dengan efektif. Para petugas ataupun perangkat Desa semakin mengoptimalkan pembagian RASKIN kepada Rumah tangga Miskin. Seperti halnya yang dikatakan oleh Kepala Desa Aek Pamienke, yang berhak mendapatkan RASKIN yaitu yang memiliki latar belakang seperti keluarga yang tidak mampu, atau yang memiliki pendapatan rendah dibawah upah minimum regional (UMR). Pelaksanaan Program RASKIN di Desa Aek Pamienke belakangan ini juga berjalan dengan lancar setiap bulannya, itu merupakan menjadi suatu rasa kepuasan bagi masyarakat yang kurang mampu. Beberapa masyarakat yang kurang mampu mendapatkan RASKIN merasa terbantu dengan berjalannya Program RASKIN ini, seperti kebutuhan perekonomiannya yang misalnya setiap bulannya mengeluarkan biaya yang cukup besar, jadi terbantu dengan adanya Program RASKIN ini. Pelaksanaan Program RASKIN di Desa Aek Pamienke berjalan dengan lancar supaya dapat memajukan Desa Aek Pamienke, karena tidak adanya kendala atau hambatan selama berjalannya program tersebut. Kepala Dusun I mengatakan bahwa masalah RTS yang mendapat RASKIN biasanya kita melihat bagaimana kondisi rumah apa layak disebut miskin dan dilihat juga dari pendapatan atau upah setiap bulannya dapat atau tidak untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dengan adanya Program RASKIN, masyarakat yang kurang mampu sangat terbantu, dan sangat merasa puas. Hal ini menjadikan bahwa masyarakat yang kurang mampu tersebut supaya tidak lagi merasa takut atau pun cemas.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa Program RASKIN di Desa Aek Pamienke cukup berjalan dengan lancar, dan seperti yang di jelaskan oleh Kepala Dusun I banyak masyarakat yang merasa terbantu dan puas. Yang berarti tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat efektif sebagaimana yang telah dijelaskan. Sebagai hasil dari wawancara, masyarakat juga mengatakan tidak adanya kendala atau hambatan selama berjalannya Program RASKIN, justru kami masyarakat yang memiliki pendapatan dibawah UMR sangat merasa terbantu atau bersyukur dengan dijalankannya Program di Desa kita ini, ujar A.Harahap (PENERIMA RASKIN).

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Implementasi Program RASKIN di Desa Aek Pamienke

Hasil penelitian mengenai implementasi program RASKIN membuktikan bahwa faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Faktor pendukung dalam implementasi program RASKIN di Desa Aek Pamienke adalah instrumen atau peraturan didalam implementasi yang jelas tertulis dalam pedoman umum RASKIN tahun 2014, kesediaan petugas dalam melaksanakan RASKIN, kesediaan warga dalam menerima RASKIN meskipun terkadang kualitas beras buruk dan ketepatan waktu dalam membayar raskin sehingga penyaluran raskin dapat berjalan lancar tanpa adanya tunggakan. Berikut penjelasan dari salah satu informan yang terkait dari faktor pendukung implementasi program raskin di Desa Aek Pamienke : Raskin lancar berkat dari kebijakan pemerintah terhadap masyarakat yang kurang mampu, meskipun adanya masalah beras yang jelek sehingga tidak menyehatkan untuk dikonsumsi.

Berdasarkan penjelasan diatas, warga yang menerima RASKIN bersedia menerimanya walaupun kualitasnya kadang terlihat buruk. Hal inilah yang mau tidak mau harus dilakukan oleh masyarakat bagaimana supaya bisa terbantu biaya hidup sehari-harinya. Dengan demikian, pelaksanaan program raskin ini dapat tepat sasaran walaupun memang dalam pencapaian sasaran tersebut masih tidak memuaskan beberapa pihak.

Terdapat 3 faktor yang menjadi penghambat terlaksananya program RASKIN:

1. Sikap

Para pelaksana kebijakan RASKIN baik pemerintah kota sebagai tim pengawas program RASKIN, PERUM BULOG sebagai Tim Koordinasi RASKIN pusat sampai pelaksana distribusi yaitu aparat Kecamatan dan Kelurahan dapat gagal karena para pelaksana kurang memahami isi kebijakan.

2. Kedisiplinan

Pelaksana sangat berpengaruh pada pelaksanaan kebijakan RASKIN. Hal ini dikarenakan petugas pelaksana di pengaruhi oleh kondisi termasuk temperamental masyarakatnya berbeda-beda.

3. Komunikasi

Dalam pelaksanaan kebijakan RASKIN terdapat sosialisasi kebijakan kepada masyarakat seperti pada Kelurahan Desa Aek Pamienke. Penyampaian informasi melalui komunikasi haruslah tepat dan terbuka,

sehingga masyarakat miskin sebagai penerima informasi akan dapat menerima informasi tersebut secara utuh dan benar.

Penyaluran RASKIN di Desa Aek Pamienke

Penyaluran RASKIN dilakukan setiap raskin turun yakni 1 bulan sekali, penyaluran dilakukan setiap kepala dusun lalu beras akan disalurkan kepada masyarakat miskin. Beras yang diterima terkadang berkualitas buruk, mungkin dikarenakan masa simpan yang lama dan cuaca yang tidak menentu. Hal tersebut yang membuat beberapa masyarakat ada yang terpaksa menerima RASKIN, dan mereka terkadang juga melakukan pengaduan kepada pemerintah desa supaya dilakukan kembali pengecekan kembali ke satker RASKIN dan akan ditukar dengan beras yang baik. Berikut penjelasan masyarakat tentang kualitas RASKIN: Kualitas RASKIN sebenarnya tidak terlalu bagus, banyak kotoran dan terkadang bau. Saya terpaksa menerima RASKIN untuk saya oplos dengan beras bagus. Kadang kalau saya mendapat beras yang jelek, langsung saya jual ke pedagang di pasar karena menguntungkan. 1 kilogram beras raskin kalau dijual jadi Rp 4.000,- jadi saya untung Rp 2.000,- katanya sih dijual lagi sama mereka (pedagang) ke pedagang lontong dan nasi goreng. Saya cuman dapat 5 kilogram dan kadang enggak sampai 5 kilogram cuman 4.5 kilo bahkan cuman 4 kilogram. Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa sumber daya ekonomi yaitu berastergolong buruk diposisi pegawai dalam hal pengecekan juga kurang baik karena dilakukan, sebagian masyarakat merasa tidak puas terhadap program RASKIN. Petugas RASKIN kurang memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya yang seharusnya lebih memperhatikan dan melakukan pengecekan secara sungguh-sungguh. Sehingga, kejadian yang telah dijelaskan diatas dapat dihindari. Sementara menurut Masyarakat lainnya, turun nya beras setiap bulannya tidak terlalu adanya masalah dalam beras tersebut. Kalaupun adanya beras yang buruk atau bau, ya itu mungkin bukan suatu tindakan yang disengaja oleh pemerintah. Sebagai penerima, mestinya harus berterima kasih kepada pemerintah atas adanya program ini dijalankan. Penyaluran RASKIN di setiap desa-desa manapun mendapatkan jatah yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah. Karena setiap per rumah tangga mendapatkan 10KG per bulan nya. Penerima RASKIN dari awal sudah di data oleh kepala dusun masing-masing. Program RASKIN adalah suatu upaya yang dapat membantu masyarakat miskin ataupun kurang mampu.

Pengelolaan Program RASKIN dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Aek Pamienke

Pelaksanaan pembangunan diarahkan untuk dapat pemeratakan pendapatan masyarakat agar setidaknya mereka mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sehari-hari. Dengan kata lain bahwa kontribusi pembangunan dalam memberikan peluang terciptanya berbagai kesempatan kepada masyarakat dalam upayanya untuk meningkatkan pendapatan perlu diciptakan. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai upaya penciptaan lapangan pekerjaan baik disektor formal maupun non formal, dapat memberikan dorongan/motivasi dalam berbagai bentuk, menciptakan iklim perekonomian yang agak longgar atau dengan kata lain lebih

banyak memberikan kemudahan-kemudahan kepada masyarakat untuk meningkatkan prestasi usahanya, dan lain-lain. Salah satu upaya tersebut ialah diimplementasikannya kebijakan/program bantuan pangan untuk rakyat miskin yang dikenal dengan istilah RASKIN atau Beras untuk rumah tangga miskin yang telah teruji dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan daya beli masyarakat, khususnya dikawasan Desa Aek Pamienke. Dengan demikian, maka upaya peningkatan daya beli masyarakat perlu dilakukan secara terus menerus, atau dalam artian bahwa pemerataan pendapatan dengan sendirinya akan berdampak positif pada peningkatan taraf hidup masyarakat itu sendiri. Program RASKIN bertujuan untuk meringankan beban keluarga dari sisi pengeluaran untuk kebutuhan pangan pokok (beras) sehingga pendapatan yang seharusnya dibelanjakan untuk pangan (beras) sebagian dapat ditabung atau diinvestasikan untuk kebutuhan-kebutuhan pokok lain seperti pendidikan, kesehatan dan kegiatan sosial lainnya. Berjalannya Program RASKIN turunnya bantuan dari pemerintah. Dari pemerintah, turun ke Desa langsung perangkat desa mengkoordinasi ke Kepala Dusun masing-masing. Setiap Kepala Dusun mendata nama-nama rumah tangga miskin mana yang layak mendapatkan RASKIN. Seperti halnya yang dikatakan Kepala Desa Aek Pamienke pelaksanaan Program RASKIN sangat membantu masyarakat miskin yang berpendapatan rendah. Dari proses pendataan yang dilakukan Kepala Dusun masing-masing bisa dilihat mana keluarga yang mampu, mana yang tidak. Sebagian penjelasan masyarakat tentang buruk dan baunya kualitas beras, itu bukan disengaja oleh pemerintah. Memang terkadang datangnya beras tidak sesuai yang kita harapkan. Dengan demikian, peningkatan pengelolaan RASKIN berjalan dengan efektif, jika adanya kendala atau gangguan seperti masalah kualitas beras yang kurang berkualitas, itu merupakan bukan kesalahan dari pihak pemerintah.

Tingkat kesejahteraan atau taraf hidup diukur dari tingkat terpenuhinya kebutuhan pokok/dasar manusia. Beberapa komponen yang termasuk dalam kebutuhan dasar pokok ini meliputi : (1) makanan, minuman, lapangan kerja, (2) kesehatan, (3) perumahan, (4) pendidikan, (5) komunikasi, (6) kebudayaan, (7) penelitian dan teknologi, (8) energi, (9) hukum, (10) dinamika politik dan implikasi ideologi. Pelaksanaan RASKIN dapat ditinjau dari aspek-aspek sosialisasi dan transparansi informasi, alokasi, penargetan, frekuensi pendistribusian, jumlah beras yang diterima penerima manfaat, sistem pembayaran dan harga beras, serta penggunaan dana.

Tujuan dan Sasaran Program Beras untuk Rakyat Miskin (RASKIN) di Desa Aek Pamienke

Program RASKIN merupakan subsidi pangan sebagai upaya dari Pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan pada keluarga miskin melalui pendistribusian beras yang diharapkan mampu menjangkau keluarga miskin. Tujuan program RASKIN adalah memberikan bantuan dan meningkatkan/membuka akses pangan keluarga miskin dalam rangka memenuhi kebutuhan beras sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan ditingkat keluarga melalui penjualan beras kepada keluarga penerima manfaat

pada tingkat harga bersubsidi dengan jumlah yang telah ditentukan dan mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Sasarannya adalah terbantu dan terbukanya akses beras keluarga miskin yang telah didata dengan kuantum tertentu sesuai dengan hasil musyawarah desa dengan harga bersubsidi ditempat, sehingga dapat membantu meningkatkan ketahanan pangan keluarga miskin. Seperti yang dikatakan Kepala Desa Aek Pamienke, tujuan berjalannya program RASKIN supaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Aek Pamienke. Berjalannya program-program lainnya di Desa Aek Pamienke ataupun kebijakan-kebijakan yang diciptakan pemerintah di Desa tersebut salah satunya program RASKIN yang berhasil dan berjalan dengan lancar. Artinya, peningkatan program ini semakin membuat masyarakat Desa Aek Pamienke merasa senang dan merasa terbantu. Pelaksanaan distribusi raskin merupakan tanggung jawab dua lembaga, yakni Bulog dan pemerintah daerah (pemda). Bulog bertanggung jawab terhadap penyaluran beras hingga titik distribusi, sedangkan pemda bertanggung jawab terhadap penyaluran beras dari titik distribusi hingga rumah tangga sasaran. Selama ini Bulog telah melaksanakan tugasnya dengan relatif baik dan sesuai aturan pelaksanaan. Namun demikian, penilaian keberhasilan program tidak dapat dilakukan secara parsial, karena RASKIN merupakan sebuah kesatuan program untuk menyampaikan beras bersubsidi kepada rumah tangga miskin.

Kendala Program RASKIN di Desa Aek Pamienke

Pemerintah mengakui ada enam titik kritis atau kelemahan yang harus dibenahi dalam pengecuran bantuan RASKIN. Keenam kritis tersebut meliputi :

- Proses pencacahan atau pendataan rumah tangga miskin
- Proses penetapan kategori rumah tangga miskin
- Proses pembagian kartu
- Proses sosialisasi
- Proses penanganan pengaduan

Sedangkan dari hasil wawancara dengan informan dilapangan, kendala yang dihadapi program RASKIN di Desa Aek Natas yaitu :

1. Penyimpangan kualitas beras yang kadang bagus kadang jelek
2. Pembagian kartu RASKIN mengandung unsur subjektifitas sehingga tidak tepat sasaran
3. Kebijakan Pembagian kartu yang kadang tidak sesuai dengan aturan, hal ini diakibatkan kurangnya kesadaran kepala dusun dalam mendata rumah tangga miskin.

Berdasarkan pedoman umum, keberhasilan pelaksanaan program RASKIN ditunjukkan dengan indikator 6 tepat :

- Tepat sasaran penerima manfaat raskin hanya diberikan kepada RTS, dari data BPS yang telah diverifikasi dalam pertemuan tingkat desa/kelurahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa atas kesepakatan warga agar beras dibagi rata untuk semua warga miskin.
- Tepat Jumlah. Tiap RTS mendapatkan 10KG per bulan selama 12 bulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat dibagi rata, maka setiap RTS

tidak mendapatkan jumlah beras sesuai aturan tergantung dari banyak sedikitnya warga.

- Tepat Waktu. Yaitu sesuai dengan rencana (jadwal) distribusi. Hasil penelitian kadang-kadang mundur.
- Tepat Administrasi. Terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar dan tepat waktu. Hasil penelitian: ada beberapa warga yang membayarnya tertunda.
- Tepat Kualitas : Kondisi beras baik, sesuai dengan standar kualitas beras pemerintah. Hasil penelitian. Kadang-kadang beras buruk dan bau.

Selain itu, pemerintah juga perlu memerhatikan beberapa hal berkaitan dengan penerapan program pemberian bantuan keluarga miskin. Pertama, diperlukan percontohan dengan skala kecil sebelum program ini dijalankan secara nasional. Kedua, bahwa program bantuan keluarga miskin yang lain hendaknya bisa memberdayakan masyarakat miskin agar mereka kelak bisa keluar dari kemiskinan.

RASKIN harus tepat sasaran, artinya harus diberikan kepada keluarga sasaran penerima manfaat yaitu keluarga miskin. Desa Aek Pamienke menetapkan keluarga penerima manfaat RASKIN melalui musyawarah desa menggunakan data dasar keluarga sejahtera. Secara umum pelaksanaan RASKIN di Desa Aek Pamienke tidak adanya masalah. Seperti halnya dikatakan masyarakat berdasarkan pertanyaan : RASKIN telah diberikan sesuai dengan sasaran saya menerima RASKIN karena keluarga saya tergolong tidak punya dan hidup pas-pasan, menurut sepengetahuan saya semua warga masyarakat yang berhak menerima RASKIN telah terdaftar dan menerima RASKIN serta tidak ada yang salah sasaran.

Dari pernyataan di atas dapat dilihat bahwa RASKIN diberikan tepat sasaran, semua warga miskin berhak mendapatkan RASKIN. Lebih lanjut lagi seorang pengurus Kaur Umum menyampaikan sebagai berikut : “RASKIN diberikan sesuai sasaran yaitu pada keluarga miskin yang ditentukan berdasarkan hasil pendataan keluarga miskin dari BKKBN yaitu keluarga prasejahtera alasan ekonomi dan keluarga sejahtera I alasan ekonomi, saya pernah mendengar keluhan dari warga masyarakat mengapa yang diberi itu-itu saja kemudian saya jelaskan bahwa sesuai aturan memang mereka yang berhak akhirnya mereka bisa memahami dan menerima”.

Hasil pernyataan di atas menunjukkan bahwa RASKIN telah diberikan tepat sasaran yaitu pada keluarga miskin yang ditentukan berdasarkan hasil pendataan keluarga miskin oleh BKKBN dengan kriteria keluarga prasejahtera alasan ekonomi dan keluarga sejahtera alasan ekonomi. Keluarga prasejahtera adalah keluarga yang belum memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal seperti kebutuhan akan pangan, sandang, papan dan kesehatan. Keluarga yang belum memenuhi salah satu atau lebih indikator-indikator keluarga sejahtera.

Faktor yang Mempengaruhi Terhambatnya Implementasi Program RASKIN

1. Komunikasi yang kurang dalam bentuk sosialisasi yang menyebabkan pemahaman masyarakat yang mengenai RASKIN masih minim, adapun

sosialisasi yang dilakukan hanya kepada antar kepala dusun kemudian diberikan informasi mengenai RASKIN.

2. Sumber daya alam dalam hal ini masih kurang fasilitas didalam implementasi program RASKIN. Sumber daya alam implementasi program ini merupakan faktor yang sangat mempengaruhi pelaksanaan program RASKIN.
3. Disposisi yang merupakan sikap implementor yang masih kurang untuk mendukung dalam implementasi program RASKIN.
4. Struktur birokrasi yang melibatkan banyak pihak yang menyebabkan implementasi program RASKIN yang membutuhkan waktu panjang dalam proses pelaksanaannya.

Mengingat bahwa setiap program bantuan pemerintah di Desa, termasuk program RASKIN seharusnya dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan maka adalah sangat penting mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya ketidak tepatan sasaran program RASKIN. Sasaran ketidaktepatan program RASKIN merupakan persoalan urusan serius, selain tujuan program tidak tercapai sesungguhnya juga merupakan peninggalan/pelanggaran hukum, di satu sisi pengelola program memberi sesuatu kepada orang yang tidak berhak. Sementara itu, informasi mengenai tujuan program dan sasaran keluarga miskin kurang ditekankan. Akibat kurangnya informasi, program RASKIN yang diharapkan dapat mempertajam sasaran atau tidak berarti. Program RASKIN tetap dikenal sebagai “SEMBAKO” (Sembilan Bahan Pokok) dari pemerintah sehingga keluarga yang tidak termasuk sasaran tetap menuntut untuk memperolehnya.

Program RASKIN dilaksanakan di seluruh Indonesia tanpa membedakan kondisi kemiskinan wilayah karena Rumah Tangga Miskin tersebar diseluruh wilayah. Berdasarkan hasil lapangan menyimpulkan bahwa ketepatan sasaran penerima merupakan aspek utama kelemahan program RASKIN karena tidak seluruh warga miskin menerima RASKIN dan masih banyak yang belum menerimanya. Salah Kepala Dusun di Desa Aek Pamienke mengatakan bahwa masalah penerima manfaat masih merupakan isu pokok karena adanya Rumah tangga Miskin yang masih belum menerima beras RASKIN. Kelemahan program raskin antara lain masih adanya keluarga mampu yang masih menerima beras raskin. Sementara itu, di sebagian dusun sasaran tidak tepat karena diterapkan sistem bagi rata sehingga seluruh kategori warga yang tidak terlalu miskin menerimanya. Sebagian di Dusun lainnya tepat sasaran karena beras raskin hanya dibagikan kepada rumah tangga yang berhak menerimanya. Meski hanya terjadi hanya di wilayah yang terbatas, berdasarkan hasil lapangan pelaksanaan program RASKIN relatif tepat sasaran. Hastuti dan Maxwell (2003:47) menunjukkan bahwa ketepatan sasaran dipengaruhi oleh adanya ketegasan dan keseriusan kepala desa dalam membagikan beras RASKIN hanya kepada Rumah tangga miskin. Kebijakan tersebut bisaditerima masyarakat setempat karena adanya upaya sosialisasi dari kepala desa bahwa beras RASKIN hanya untuk RTM, dan adanya transparansi rumah tangga penerima.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan setelah diadakan analisa data, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian, Pengelolaan Program RASKIN terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Aek Pamienke Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhan Batu Utara. Pengelolaan Program RASKIN di Desa Aek Pamienke masih belum dilaksanakan dengan baik. Dengan kata lain, proses pengelolaan yang dilakukan pemerintah Desa Aek Pamienke belum sepenuhnya berjalan dengan lancar. Masih belum nya dilakukan secara adil atau tidak sesuai yang diharapkan warga Desa Aek Pamienke. Terkadang ada sesuatu hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan beras RASKIN. Sebagai contohnya di sebagian dusun masih ada warga yang mendapatkan beras yang kurang berkualitas misalnya beras yang buruk kelihatannya buruk dan bau. Peneliti mengamati bahwa terdapat beberapa penjelasan mengenai kualitas beras dan proses pembagiannya yang masih kurang merata. Hal tersebut yang perlu diselesaikan supaya proses pengelolaan beras RASKIN dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seperti penjelasan di atas kurangnya kualitas beras, sebagian warga Desa Aek Pamienke masih tetap menerima beras RASKIN. Karena mereka dapat menjualnya kembali ke pasar atau pun ke warung-warung nasi. Hal tersebut merupakan suatu keuntungan bagi warga Desa Aek Pamienke.
2. Berdasarkan hasil penelitian ditemukannya faktor-faktor yang mempengaruhi terhambatnya implementasi program RASKIN di Desa Aek Pamienke adalah sebagai berikut :
 - a) Komunikasi yang kurang dalam bentuk sosialisasi yang menyebabkan pemahaman masyarakat yang mengenai RASKIN masih minim, adapun sosialisasi yang dilakukan hanya kepada antar kepala dusun kemudian diberikan informasi mengenai RASKIN.
 - b) Sumber daya alam dalam hal ini masih kurang fasilitas didalam implementasi program RASKIN. Sumber daya alam implementasi program ini merupakan faktor yang sangat mempengaruhi pelaksanaan program RASKIN.
 - c) Disposisi yang merupakan sikap implementor yang masih kurang untuk mendukung dalam implementasi program RASKIN.
 - d) Struktur birokrasi yang melibatkan banyak pihak yang menyebabkan implementasi program RASKIN yang membutuhkan waktu panjang dalam proses pelaksanaannya.

Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis terhadap implementasi pengelolaan program RASKIN terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Aek Pamienke Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhan Batu Utara , terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi implementasinya. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis mengajukan rekomendasi kebijakan sebagai berikut:

1. Aparat Desa Aek Pamienke Kecamatan Aek Natas Kabupaten disarankan untuk melaksanakan program sosialisasi antara para perangkat-perangkat desa dalam meningkatkan kesejahteraan program RASKIN. Sosialisasi dari setiap peraturan mengenai pengelolaan program RASKIN tersebut seharusnya tetap diawasi dengan baik sehingga pengelolaan dapat terwujud dan hendaknya sumber daya dalam implementasi kebijakan ini dapat dipenuhi, baik sumber daya manusia serta sumber daya non manusia seperti ketepatan cairnya dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dibutuhkan untuk program tersebut. Serta alangkah baiknya pemerintah desa senantiasa memberikan motivasi kepada masyarakatnya dan menyadarkan bahwa setiap program-program pembangunan desa yang dilaksanakan akan dapat meningkatkan status ekonomi masyarakat. Dalam kesempatan ini penulis merekomendasikan agar pemerintah lebih memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat miskin dan lebih memberikan program-program lainnya yang dapat membantu masyarakat dalam partisipasi program tersebut.
2. Aparat Desa Aek Pamienke Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhan Batu dalam menghadapi program RASKIN yang telah ditetapkan pemerintah harus mampu mengelola RASKIN yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam program tersebut harus diutamakan pada golongan masyarakat miskin atau yang berpendapatan rendah. Agar masyarakat miskin yang berpendapatan rendah di Desa Aek Pamienke merasa terbantu dan sejahtera dalam menerima bantuan program tersebut.
3. Kepada masyarakat Desa Aek Pamienke Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhan Batu Utara direkomendasikan agar lebih tetap tenang dalam pembagian RASKIN. Karena seperti yang diketahui masih adanya pengaduan masyarakat tentang RASKIN yang mengatakan masih adanya Beras yang buruk dan bau. Kurangnya kualitas dalam Beras. Itu semua merupakan unsur ketidak sengajaan, pemerintah tidak terlalu lebih mengetahui bagaimana kondisi Beras tersebut. Pemerintah Desa Aek Pamienke tidak ingin nya masyarakat merasa kecewa atas ada nya pengaduan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Data BPS Kemiskinan, Jakarta CNN Indonesia
- Cresswell, J.W. 2013. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, Yogyakarta: Pustaka Belajar. Edisi Ketiga
- Winarno, B. 2014. *Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus* Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service. Cetakan Kedua
- Purwanto, E.A & Sulistyastuti, D.R. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media. Cetakan Pertama.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta. Cetakan Kesepuluh.
- Khomsan, Ali. 2015. *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin*. Bandung: Pustaka Obor Indonesia.
- Harrison, L. 2009. *Metodologi Penelitian Politik*, Jakarta: Kencana.
- Yin, R.K. 2005. *Studi Kasus Desain & Metode*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi dilengkapi dengan Metode R & D*. Cetakan kesepuluh.
- Ph. D, Adi Fahrudin, Prof. 2014. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Cetakan Kedua.
- Adi Rukminto Isbandi. 2013. *Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Cetakan Pertama.
- Karman. 2006. *Melawan Kelaparan & Kemiskinan*. Jakarta: Departemen Pertanian